

Lampiran

Pedoman Wawancara dan Hasil Wawancara

A. Pedoman wawancara

(Kata kunci atau garis besar pertanyaan, berdasarkan evaluasi model CIPP dan konsep pemberdayaan 7 E)

1. Apa yang Anda ketahui dengan tujuan PPK (PNPM)?
2. Apa yang menjadi pedoman kerja PPK?
3. Apakah ada pelatihan yang diberikan oleh PPK? Kalau ada jenis pelatihan apa?
4. Faktor apa yang mendukung dan yang menghambat pelaksanaan PPK?
5. Apakah bantuan yang disediakan oleh program (PPK) telah mencukupi?
6. Apa upaya yang dilakukan PPK agar masyarakat tetap memperhatikan program?
7. Apakah bantuan PPK sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
8. Apakah tujuan PPK tercapai (PPK berhasil) menurut Anda?
9. Apa ukuran keberhasilan PPK?
10. Apakah pendapatan berubah setelah ada PPK?
11. Apa sumber pendapatan/pekerjaan utama Anda?
12. Apa manfaat PPK menurut Anda?
13. Bagaimana pendampingan yang ada dalam PPK menurut Anda?

B. Hasil Wawancara (*Transkrip*)

1) Informan: Bp Nano dan Bp Engkos (RT 03).

1. Tujuan PPK: “menuju masyarakat mandiri, mencukupi kebutuhan sehari-hari”.
2. Pedoman yang digunakan: “ada, yaitu PTO”

3. “Sudah ada pelatihan kepada 2 orang FD (fasilitator desa) tentang pelaksanaan pekerjaan fisik, selama 2 hari. Diberikan oleh FT (fasilitator teknik) dan juga diberikan kepada TPK (tim pelaksana kegiatan)”
4. Permasalahan yang dihadapi:
 - a) “SDM, daya tangkap rendah, sulit menerima informasi baru”
 - b) “Swadaya agak tersendat. Semula sudah sepakat, tapi yang sangat miskin tidak bisa ikut swadaya penuh, karena harus cari makan”.
 - c) “Karena cuaca, seperti banjir”
 - d) “Tidak ada modal untuk bidang pertanian atau peternakan, hanya ada untuk berdagang. Karena cicilan pinjaman untuk pertanian atau peternakan tidak bisa bulanan, tapi musiman atau 6 bulanan”.
 - e) “Sudah ada penyuluhan, tapi warga kurang paham”
 - f) “Kurang lapangan kerja”
 - g) “Masalah tanah garapan warga seluas 26 ha, dulu milik pemerintah, sekarang milik PT Bukit Sentul, masyarakat khawatir kehilangan pekerjaan sebagai petani”
5. Pekerjaan utama: “berkebun (singkong, jagung, kc tanah, dalam setahun 1,2 jt) dan mencari batu di kali dan angkut batu. Upah mencari batu untuk yang tua 20 rb dan yang muda 40 rb per hari”.
6. “Ada perubahan pendapatan secara tidak langsung:
 - a) Ongkos angkutan (produksi) turun, karena ada perbaikan jalan.
 - b) Dapat modal ada yang untung dan ada juga yang rugi; karena tidak ada pembukuan, untuk modal dan untuk makan bercampur”

7. “Untuk tujuan kemandirian, BLT diganti saja dengan subsidi, seperti subsidi pupuk dll. BLT jadi bumerang, karena seharusnya yang dapat BLT 117 KK dan bukan hanya 27 KK. Ukuran kemiskinan, yaitu pendapatan rendah dan lahan garapan sempit. Kuli cangkul dengan upah 20.000 rupiah”.
8. “Kelompok SPP agar modalnya ditambah dari 500 rb menjadi 1 jt. Tapi karena banyak yang macet, mungkin justru berkurang. Pilihan usaha tidak tepat, karena yang buka warung banyak, sehingga tidak laku atau rugi”.
9. “Sebaiknya pemberdayaan masyarakat: untuk modal pertanian, peternakan (kambing), pemeliharaan jamur, lele, belut dll”
10. Faktor pendukung: “SDA (pasir dan batu banyak); tenaga kerja (swadaya), program sesuai kebutuhan masyarakat”.
11. Harapan ke depan kepada program: “meningkatnya kesejahteraan rakyat:
 - a) agar diciptakan lapangan kerja dengan upah yang memadai
 - b) penyediaan modal untuk berbagai bidang
 - c) meningkatkan SDM dengan pelatihan-pelatihan yang meningkatkan keahlian (misal dari kenek menjadi tukang dll.)”.

2) Informan: H. Maesaroh, Ibu Yanti, Ibu Heni, Ibu Rosnani (kelompok perempuan, SPP Dahlia kp Pasirmaung, desa Cijayanti)

1. “Tujuan SPP: (a) memberdayakan kaum wanita; (b) bantu-bantu suami/keluarga”
2. “Ada pedoman kerja dalam PPK. Modal usaha untuk usaha baru tidak boleh, hanya boleh untuk tambahan modal usaha. Sebelumnya membuat ajuan modal,

ada tim survey. Kami mengajukan untuk modal tambahan jahitan, kredit barang/pakaian/ perabotan dapur, dan usaha jual beli material bangunan. Bunga pinjaman 2% per bulan dan lunas 10 bulan”.

3. “Ada pelatihan pengurus: buat proposal; menggali swadaya; penggalan gagasan. Untuk swadaya (ibu-ibu menyediakan makanan)”.

4. Hambatan:

- a) “Tunggakan kredit, misal ada yang nunggak/macet, maka anggota lain yang 9 orang tidak pinjam lagi.
- b) “Prosesnya terlalu lama, dari sosialisasi sampai pencairan hampir 10 bulan atau satu tahun”
- c) “Kenaikan harga material, ketika survey harga 3 bulan sebelumnya misalnya harga semen Rp 52.000 berubah menjadi Rp 53.500”
- d) “Kegiatan harusnya musim kemarau, tapi ini musim hujan. Bulan Desember – Februari baru turun dana untuk rabat beton”.
- e) “ Pada awalnya swadaya sanggup 40%, ternyata tidak sanggup, sehingga pekerjaan fisik rabat beton tersendat-sendat, dan masih sepanjang 50 m lagi”.

5. Potensi:

- a) “sumberdaya alam, pasir, batu”
 - b) sumberdaya manusia seperti tukang, tenaga kerja (ibu-ibu juga ikut membawa batu), peralatan”
 - c) usaha lancar, pinjaman lancar tidak untuk keperluan konsumsi”
6. “Program berhasil, tetapi belum semua bisa mengerti atau paham”.

7. a) “Terjadi peningkatan pendapatan, karena jumlah pelanggan naik, dan meningkat jangkauan dagang dari 1 kampung menjadi 3 kampung”.
 - b) “ongkos angkut barang seperti singkong turun, dulu dipikul”
 - c) “anak sekolah pakai sepatu, karena jalan tidak becek lagi”
8. Bentuk pemberdayaan:
- a) “Bangun pabrik di sini, untuk buka lapangan kerja. Karena anak-anak muda yang sudah selesai sekolah atau kuliah, tapi tidak dapat kerja”.
 - b) “Setiap desa harus bisa buka lapangan kerja.
 - c) “Biaya sekolah mahal, sekolah bertahun-tahun dan sepertinya ijazah tidak berguna”.
 - d) “PNPM belum bisa buka lapangan kerja jangka panjang, baru musiman ketika ada pekerjaan fisik”.

3) Informan: Bapak Ujang, desa Kr. Tengah

1. “Mendapat pinjaman dari SPP Rp 500.000”
 2. “Untuk usaha kue cucur, gemblong, kemudian dititip di warung-warung”
 3. ”Banyak peluang untuk mengembangkan usaha, tapi kurang modal”
 4. a) “Proses SPP dan pembangunan fisik lama”
 - b) “Modal bisa hilang momentum”.
 - c) “Karena bosan menunggu, lebih kurang 1 tahun, bisa ke rentenir lagi”
5. Pemeliharaan: ”tidak ada portal, sehingga jalan rusak”

4) Informan: Bapak Sagiran (guru SD), desa Kr Tengah

1. “Masyarakat yang paham tujuan PPK kurang lebih 20%”
2. ”Kegiatan dalam PPK berupa pembangunan infrastruktur dan simpan pinjam”
3. “Tujuan program belum tercapai, yaitu:
 - a) “mensejahterkan rakyat”
 - b) “rakyat menggunakannya seefektif mungkin”
 - c) “penghasilan warga meningkat”
4. Masalah:
 - a) “Pernah terjadi penyalahgunaan modal/tidak bergulir secara utuh, hanya 30% kembali”
 - b) “Peminjam tidak memiliki keahlian usaha”
 - c) “Usaha tanpa manajemen yang bagus, karena belum ada pelatihan”
 - d) “Pelatihan keterampilan hanya terbatas bagi kader PKK tentang pembukuan”
 - e) “Infrastruktur bagus, tapi bisa terjadi tumpang tindih program; dari pemda ada tapi dari PNPM ada lagi. Bahkan akhirnya tidak jadi, karena yang tadinya dianggarkan pemda, akhirnya tidak jadi”.
5. “Pemanfaatan infrastruktur belum maksimal, sehingga taraf hidup rakyat belum meningkat”.
6. Tingkat keberhasilan: “infrastruktur ok, tapi modal tidak, karena jika ada 1 orang macet, maka seluruh kelompok macet/tidak bisa pinjam lagi”.
7. Bagaimana agar RTM (rumah tangga miskin) bisa terlayani:

- a) “RTM diberi pelatihan keterampilan dulu, baru bikin usaha, baru bisa pinjam”.
 - b) “usaha pertanian tidak bisa”
 - c) “upah pekerjaan RTM dalam pekerjaan fisik 50%”
8. “Sekarang telah terjadi perubahan struktur pekerjaan”:
- a) “Setelah ada PT perumahan, tanah menjadi milik PT”
 - b) “Penghasilan masyarakat turun, karena dulu menggarap tanah milik sendiri, sekarang sebagai buruh pada lahan milik PT dan hanya pekerjaan musiman”
 - c) “Wilayah tambah maju, tapi petani tidak kerja di PT, karena tidak bisa jadi satpam atau yang lain”
9. Bentuk pemberdayaan yang baik: “mungkin seperti koperasi mandiri, dengan usaha kelompok”.
10. “PNPM bagus, tapi antusiasme pemerintah/pejabat kecil atau kurang peduli. Mungkin karena tidak ada stimulus, atau upah untuk mereka tidak ada”
11. “Orang yang pinjamannya macet justru dari orang-orang yang ngerti”

5) Informan: Bapak Sudadi, Pasir Maung desa Cijayanti

1. Tentang PPK:
 - a) “Ramenya masyarakat hanya pas turun uang”
 - b) “Pelatihan, hanya FD saja yang ikut, warga tidak”
 - c) “Kalau kampungnya ingin dapat, warga kampung semua kumpul di desa, karena ada pemilihan agar menang”

- d) “Waktu perangkaan juga pada kumpul”
2. Kelemahan: ”tidak ada tenaga ahli di desa. Hanya ada di tkt kecamatan, misal tukang aspal jalan”
 3. “TPK dipilih di desa dengan suara terbanyak. Tapi kadang-kadang yang terpilih orang yang kurang mampu”.
 4. “Beli batu kali dan pasir dari toko material, volumenya tidak tepat atau kurang, sehingga dana RAB bisa-bisa tidak cukup”
 5. “Dari RK (rencana kegiatan) ke realisasi, jika anggaran naik, maka swadaya naik. Misalnya rencana 35 m³ makan 80 m³, maka ditutup dengan swadaya, karena toleransi dari program hanya 2%”
 6. Upah tenaga kerja 8 jam kerja: “untuk kenek Rp 15.000 dan tukang Rp 25.000. kalau harga umum, kenek Rp 30.000 dan tukang Rp.40.000”
 7. Pendukung: “swadaya masyarakat dan sumberdaya alam”
 8. Penghambat:
 - b. “antara waktu pelaksanaan dan turun dana, harga material sudah berubah naik”
 - c. “volume tidak cocok antara pembelian dan fakta, misal beli pasir 5 m³, tapi setelah diturunkan, diukur dan dipakai hanya 4 m³, padahal dalam perencanaan kebutuhan pasir 5 m³”.
 - d. “Untuk pengerasan jalan, yang lebih untung yang punya mobil. Sehingga lebih adil jika untuk membangun sekolah karena dinikmati semua golongan masyarakat”.

9. “Sasaran pemberian pinjaman modal, seharusnya usaha yang belum jalan, bukan yang sudah jalan, tetapi resiko macet kredit tinggi”
10. “Rata-rata warga tidak tahu tujuan PPK, tidak tahu maksudnya apa, yang penting jalan diaspal dst..”
11. Manfaat: “melancarkan transportasi produksi dan keperluan masyarakat. Jadi rame lalu lintas dan jadi jalan alternatif”.
12. Tujuan:
 - a) “belum tercapai”
 - b) “SDM kurang didukung, tidak ada untuk sekolah lanjut”
 - c) “keinginan masyarakat untuk pendidikan dan kesehatan”
13. “Pelatihan harus ditambah pesertanya, seperti tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW dll. Karena kalau hanya untuk TPK, dalam 1 desa hanya 3orang”
14. “Untuk posyandu harusnya ada dokter keliling, jangan nunggu orang sakit”
15. “Untuk Kp Pasirmaung tertolong dengan adanya PT perumahan Bukit Sentul, karena masyarakat bisa kerja sebagai penjaga rumah, satpam perumahan, buruh harian membangun rumah, tukang taman/menyiram, satpam pribadi, pemborong cat/taman, dan buruh cuci-seterika”.

6) Informan: Bapak Ubet (55), RTM, desa Kr. Tengah

1. Pekerjaan:
 - a) “Sebagai kuli macul di tanah pak Haji upahnya Rp 15.000 sampai jam 12.
Kalau istri kuli ngoret rumput dapat Rp Rp 6.000 sampai jam 11”.
 - b) “Bagi hasil kambing 5 ekor”
2. Bantuan pemerintah: “Dapat raskin, tapi BLT tidak”

3. Hasil PPK: “Dulu sekolah bocor, sekarang tidak”
4. Pinjaman modal: “Seharusnya semua dapat. Sudah mengajukan pinjaman, tapi belum ada”.
5. Pembinaan: “tidak ada yang memberi penyuluhan”

7) Informan: Bapak Iya (54), desa Kr. Tengah

1. Pekerjaan:

- a) “menggarap tanah milik PT, dan tumpang sari dengan kehutanan, dengan tanaman kacang panjang, buncis dan singkong”
 - b) “memelihara kambing sendiri, 9 ekor”
 - c) “tapi kalau nanti tanah diambil PT, belum tahu mau kerj apa?”
2. Tentang PPK: “tidak pernah tahu atau dengar. Kerja bakti hanya karena digerakan sama pak RT, pokoknya bagaimana pak RT saja”.
 3. Dalam kesempatan ini wawancara dilakukan secara kelompok, yaitu Bp Cucu (petani), Bp Junaedi (buruh tani), Bp Iya dan Bp Ubet.
 4. Menurut Bp Cucu: “yang penting kalau pinjam akan ngembalikan, terutama untuk beli pupuk, tapi nggak dapat”.

8) Di kantor desa Gn Menyan kecamatan Pamijahan,

(wawancara kelompok: Bp Dede Suparman (35), Bp Jatna (45), Bp Syarif, Ibu Diana.

1. “Bantuan PPK berupa: pengaspalan di kp Babagan, bendungan di kp Cikoneng, pengerasan jalan di kp Sawah dan pinjaman SPP untuk 60 orang”.
2. “Swadaya cukup besar, misal berupa lahan untuk jalan”

3. Manfaat pinjaman bagi kelompok perempuan SPP: “Dulu ngendelin suami, sekarang istri juga mempunyai penghasilan”.
4. “Pinjaman modal untuk nambah barang dagangan warung dan pedagang sayuran keliling”.
5. “Pengembalian pinjaman minimal 90%, jika di bawah 90% tidak dapat lagi”.
- 6.”Kami ingin ada jaminan kesehatan, tapi belum ada”.

9) Di Kp Cikoneng, desa Gn Menyan

(Wawanacara kelompok: anggota SPP, Ibu Sarni, Ijah, Ani, Yati, Indun, Mimin, Sani, Aisyah)

1. Tujuan PPK: “Untuk meningkatkan ekonomi keluarga”.
2. “Usaha untuk meningkatkan ekonomi rumah tangga atau bantu suami”
3. “Kami minta waktu, 2 bulan baru cicil karena kredit belum untung”
4. “Dengan adanya pinjaman modal usaha kami jadi berkembang, pelanggan bertambah”
5. “Biaya administrasi 1 %, dana sosial 0,5% dan jasa 22% per tahun”
6. “Pelatihan bagi masyarakat atau pemanfaat tidak ada, hanya untuk pelaku”
7. Menurut KPMD/Ibu Diana: “pembinaan untuk kelompok tidak ada, karena tidak ada perintah untuk pembinaan. Juga tidak ada pertemuan kelompok”
8. “Kami perlu tambah modal, karena akan tambah luas jangkauan pelanggan”
9. Penghambat:
 - a) “Ada yang macet, di kelompok lain”
 - b) “Pinjaman berikutnya lama, sekitar 2 bulan karena modal di UPK terbatas”.

- c) “Tenggang waktu digunakan untuk verifikasi, dengan jaminan KTP dan barang berharga”.

10. Pendukung: ”jenis usaha belum banyak, jadi usaha masih lancar”

10) Kp Ciasmara - desa Ciasihan

(Wawancara kelompok dari SPP Ibu: Cucu, Lilih, Nung, dan Riza)

1. “Bantuan PPK berupa: jalan beton (2003/2004), MI (2003/2004), jalan aspal (2007)”
2. “Pada tahun 2004 terbentuk 4 kelompok SPP”
3. “Pinjaman modal untuk dagang kecil dan untuk dagang oleh suami: martabak, gorengan, beras dan pulsa”
4. “Yang dikasih pinjaman yang sudah jalan, seharusnya tidak dibatasi”
5. “Tidak ada pembinaan, hanya ada penjelasan waktu verifikasi dan pencairan”
6. “Usulan kegiatan dibuat mulai dari tingkat dusun/RW, desa dan UPK”
7. ”Kalau ada 1 orang yang macet, harus ditanggung renteng”
8. “Usaha dilakukan untuk bantu suami sebagai petani atau pedagang di kota”
9. Pemberdayaan disebut berhasil:
 - b) “Mampu buka lapangan kerja baru. Terdapat fasilitas pendukung jalan dan sekolahan. Ibu-ibu sudah mempunyai penghasilan sendiri”
 - c) “Keluarga bisa mandiri atau mencukupi kebutuhan sendiri”
10. Hambatan:
 - a) “Swadaya jika besar agak susah”
 - b) “Modal di UPK terbatas”
 - c) “Sebagian besar swadaya membeli dan sebagian kecil barang setempat”

11) Informan: Bp Madroi (66) di Kp Sukamulya – Ciasihan

1. “Bantuan jalan beton dibangun pada tahun 2003, bermanfaat sampai sekarang”
2. “Waktu itu swadaya lebih kurang 50% berupa batu dan pasir”
3. Perkerjajaan: “piara kambing 10 ekor bagi hasil, menggarap sawah “seluas” lebih kurang 10 liter bibit padi, bagi hasil panen dapat 2 karung gabah dan jadi beras habis 1 bulan”
4. “Orang yang gak punya takut pinjam. Belum pernah pinjam, takut gak bisa bayar”
5. Tujuan PPK: ”nggak tahu, yang penting kerja atau buruh”
6. Harapan ke depan: “ Rehab mushola, penyediaan air minum, ada sumber air jaraknya 1000 meter, dan pengerasan gang”.

12) Informan: Bp Ahmad, Kp Cikoneng – Gn Menyan

1. Bentuk bantuan: “bendungan dan saluran irigasi, untuk sawah dan kolam”
2. “Modal swadaya masyarakat. Awalnya masyarakat kurang percaya, kalau akan bermanfaat. Karena dari masyarakat susah atau lambat”
3. “Jika ada sisa bahan seperti pasir, batu dan semen bisa dimanfaatkan untuk nambah saluran. Tadinya tidak ada jatah sampai sini”

13) Informan: Bp Udin, Kp Cikaramat

1. PPK: “bantuan jalan dan sebagainya”
2. Tujuan: “untuk memudahkan transportasi”

3. Caranya: “dilomba masing-masing RW, tapi hanya RW ini yang dapat”.
4. “Semua desa ikut lomba, di desa juga dilomba”
5. “Untuk dapat bantuan harus ada swadaya. Ada yang swadaya berupa uang tapi dibeliin pasir, batu dan untuk upah”
6. “Peraturannya untuk jalan beton semen dan pasir, 1 banding 4, tapi kenyataannya 1 banding 8”.
7. “Untuk aspal tiap drum 25 meter jalan, jadi untuk 680 meter membutuhkan 22 drum, tapi kenyataannya hanya 20 drum”.
8. “Mungkin ada kesalahan yang mengelola, makanya jalan cepat rusak, karena semen dan aspal kurang. Protes-protes juga tidak ditanggapi”.
9. “Upah lebih rendah, untuk tukang dari 40.000 menjadi 30.000 dan untuk kenek dari 30.000 menjadi 20.000”.
10. Manfaat: ”Dulu ojekpun sulit, mobil juga sulit atau tidak mau, tapi sekarang lancar”.
11. “SPP dapat 2 juta untuk 10 orang, jadi masing-masing dapat pinjaman Rp 200.000. Sudah lunas, tapi tidak mau ambil lagi”.

14) Informan: Kp Cikramat, desa Ciasihan, Pamijahan

(Wawancara kelompok dengan anggota SPP, Ibu: Eti, Inay, Aas, Sani, Marni, Tati, Aat, Ati, Sari, Edah, Ita)

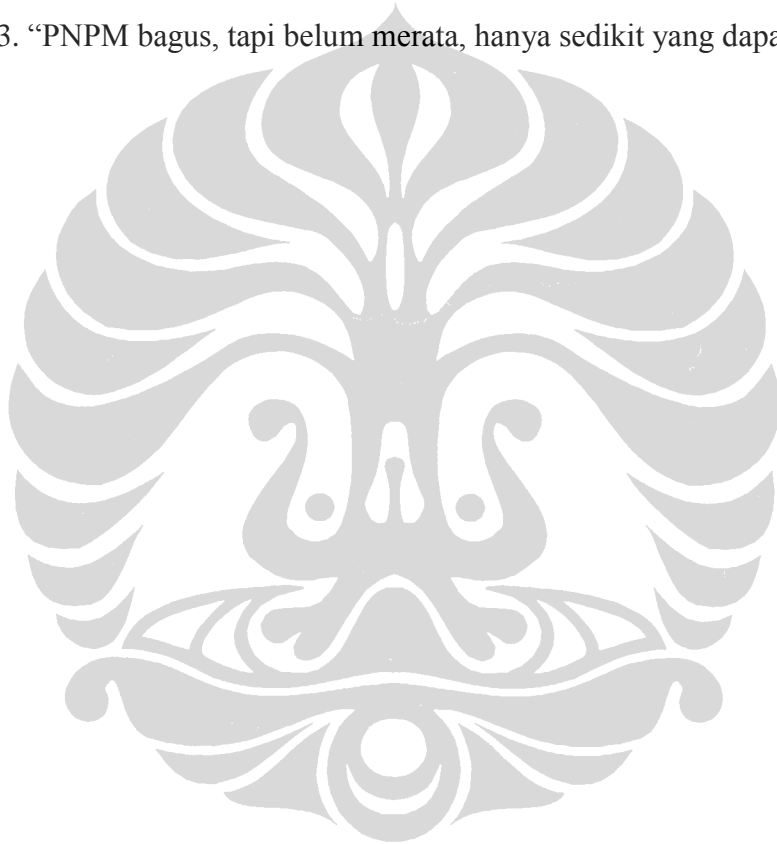
1. Tentang PPK: ”tidak tahu PPK”
2. Pekerjaan: ”sebagai kuli tani, upah laki-laki 15.000 dan perempuan 10.000. Seminggu dapat kulian, 2 minggu tidak ada. Juga sebagai pencari pasir dan batu split. Satu kaleng dijual 1.000 rupiah”

3. Konsumsi: “nasi 3 kali dengan sayur dan ikan asin. Tempe kadang-kadang saja”.
4. Ukurang kesejahteraan: “orang punya adalah yang punya sawah, tidak beli beras dan punya kerbau. Orang tidak punya itu kuli musiman, 1 rumah untuk 3 keluarga, tidak punya sawah, anak banyak. Ukurannya bukan rumahnya, karena kadang-kadang punya sawah dijual untuk buat rumah”.
5. Pinjaman: ”Pengin pinjam, tapi takut tidak bisa ngembaliin. Yang ditawari yang punya warung/usaha. Karena kalau kami ditawari takut tidak bisa jalan”.
6. Harapan: “ingin ada perusahaan atau pekerjaan. Karena kalau nunggu kuli sawah (padi) lama. Makanya beberapa suami kerja dagang di Jakarta”.

15) Informan: Kp Kawakilan III, desa Pasarean, Pamijahan
(Wawancara kelompok dengan ibu-ibu anggota SPP: Rosmani, Hamzah, Mimin, Herlina, Emi, Dedeh, Encup, Umayah, Endah, Alih).

1. “Baru dapat pinjaman dari PNPM, dari dulu belum”
2. “Bayar tiap bulan, disuruh nabung juga”
3. Manfaat: “untuk dagang, seperti dagang cendol”
4. Tujuan PPK: “masih awam, karena tidak ada penjelasan juga”
5. “Kalau ada yang nunggak harus ditanggung renteng”
6. “Proses untuk dapat pinjaman 500.000 sampai setahun baru cair”
7. “Pertemuan rutin bagi pelaku di kecamatan tidak ada lagi”
8. “Tugas KPMD tidak ada lagi, selain penagihan kepada SPP”
9. “Penyuluhan dari UPK tidak ada”
10. “Kalau mengajukan pinjaman harus bikin kelompok, yang negcek atau verifikasi KPMD bukan UPK”

11. “Orang yang tidak punya: pekerjaan sebagai kuli, tidak punya rumah layak, makan seadanya seperti, makan 2 kali sehari dengan lauk ikan asin yang dibakar, tidak pake minyak”
12. “BLT lebih baik dihapus saja, karena sampai RT pada ngundurin diri karena dianggap salah sasaran. Gara-gara BLT banyak masyarakat berantem, salah sasaran. Lebih baik diganti dengan harga sembako murah saja”.
13. “PNPM bagus, tapi belum merata, hanya sedikit yang dapat pinjaman”



Lampiran

Transkrip Verbatim Triangulasi dan FGD

Bp Wiji Suparno

”Menurut saya program PPK atau sekarang disebut PNPM atau program pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan itu sangat dibutuhkan di pelosok-pelosok perdesaan seperti desa saya Karang Tengah, sangat membutuhkan dana dari PNPM.

Alhamdulillah terima kasih PNPM atau PPK telah memberikan dana dari tahun 2004 sampai sekarang. Itu sangat membantu masyarakat contohnya dari bentuk segi ekonomi, masyarakat dapat pinjaman modal awal walaupun sedikit tapi bisa dipakai modal awal walaupun 500 ribu sangat membantu di desa Karang Tengah”.

”Terus mengenai pembangunan prasarana itu juga sangat menguntungkan banget yang tadi daerah pelosok itu belum ada jalan aspal. Saya contohkan tahun ini membangun jembatan yang ada di Kp Cimandalak itu tadinya jalan setapak, sekarang sudah ada jalan dan jembatan penyebarangan. Jadi bisa dilalui mobil, jadi sangat membantu kemajuan ekonomi”.

”Disini tadinya masyarakat itu hasil panen dari kebun menggunakan tenaga orang, dipikul, sampai ongkosnya berlipat tapi kalau sekarang mobil sudah bisa masuk, meningkatkan di dalam ekonomi masyarakat. Mengenai program pendidikan dalam desa terutama desa Karang Tengah, sudah mengajukan prasarana tempat pendidikan, sekarang mengusulkan SMP tahun 2010 kerjaan naik (dua lantai) tinggal pelaksanaanya pembangunan lokal, tambah lokal/ruang. Itu muridnya meledak malah sampai masuk sekolah ada yang siang ada yang pagi. Satu lokal itu diisi 50 orang, jadi 50 orang itu

belum efektif apa lagi kalau hari Sabtu ada PKBM anak sekolah yang *droop out* paket A,B,C hari Sabtu dan hari Minggu”.

”Masalah pendampingan di Karang Tengah itu sangat luas wilayahnya, jadi masalah pendamping tidak seluruhnya terjangkau jadi kurang pendamping, kurang pelaku-pelakunya. Di kecamatan cuma tiga, di desa itu ada FD atau KPMD sama TPK (tim pelaksana kegiatan), jadi kalau ada kegiatan baru mengajarkan. Kalau evaluasi yang dilakukan oleh proyek PPK kalau untuk aspek program yang dievaluasi pinjaman, sebelum pinjaman dana dikucurkan atau dikasih baru dievaluasi atau diverifikasi terlebih dahulu.

”Nanti baru dikasih modal berapa, tapi modal pertama dikasih 500 ribu dan kalau yang 1 juta ke atas bergiliran, itu untuk melanjutkan perlu penambahan modal agar kegiatannya maju”.

”Kalau pelatihan dan pelatihan pelaku-pelaku untuk kepala desa ada pelatihan, sebelum dana dikucurkan ada pelatihan kepala desa, pelatihan RT, KPMD, jadi pelaksana kegiatan itu dilatih dulu.

Kalau buat latihan sudah ada anggaran dari kecamatan, kalau pelatihan 1 kali kalau mau dapat bantuan pelatihan tetapi tidak semua ada pelatihan pelaku. Kalau masyarakat umum pelatihan yang dilakukan cuma tim pemelihara kegiatan biasanya ada pelatihan 3 orang yaitu ketua, bendahara, sekretaris, diadakan pelatihan dalam pemelihara kegiatan.”

”Untuk umum, pelatihan biasanya cuma pas pinjam aja, kegiatan apa saja tanpa keterampilan atau tanpa kegiatan di kecamatan-kecamatan belum ada yang pernah muncul. Untuk keterampilan seperti kepada RTM itu belum ada tapi sebenarnya itu bisa

diusulkan. Karena wilayahnya, wilayah saya yang desa Karang Tengah banyak. Jadi jalan di sini dibetulin yang di sana rusak jadi terlalu luas wilayah untuk pembangunan itu”.

”Jadi kalau untuk keterampilan itu tergantung usulan ekonomi, pinjaman, terus sarana prasarana bisa berupa pelatihan-pelatihan, bisa pembangunan, jadi semua itu disediakan”.

”Ya alhamdulillah peningkatan itu ada, contohnya tadi kalau ngambil hasil-hasil panen tadi ngambil ongkosnya besar tapi sekarang jalan diperlebar, jalan diperbaiki bagus jadi prasarana jalan transportasi lancar lagi bisa lebih murah biaya jalannya.

Jadi dari situ pendapatan para petani meningkat selain dari itu juga dibuktikan dengan kalau jalan sudah bagus biasanya mendongkrak harga tanah, dulu per meter persegi Rp 15.000 sekarang Rp 50.000 tidak dijual, kenaikan meningkat setelah ada pembangunan dari PNPM, harga tanah juga melambung dan para petani juga meningkat keuntungannya”.

”Kalau dana untuk pelatihan-pelatihan, pendamping sudah ada dana dari anggaran pemerintah kabupaten untuk pelatihan-pelatihan sudah ada pelaku-pelakunya sudah di anggarkan dan untuk pelaku-pelaku pelaksana di desa pelaku itu menggunakan operasional dari kegiatan itu biasanya ada operasional 3 % untuk pelaku kalau untuk simpan pinjam sama ada operasional 3 % itu bisa digunakan untuk apa saja kepentingan program itu.”

”Kalau untuk SPP tergantung usulan dari masyarakat karena masyarakat Karang Tengah kemarin mengalami kemacetan sebelumnya, jadi masyarakat masih kurang paham. Karena pelosok banget, jadi masih ada pendapat kalau uang keluarnya dari desa atau pemerintah anggapannya pemerintah, jadi kalau tidak dikembalikan ya tidak apa-apa

tapi alhamdulillah sekarang kita lebih hati-hati meminjamkan uang. Itu jadi kita bina dulu peminjam jangan sampai menunggak, nanti dikasih iming-iming juga kalau lancar nanti mereka bisa meningkat pinjamannya, usaha tambah besar dan pinjaman tambah besar”.

”Untuk dana alhamdulillah mencukupi di situ kan ada kesepakatan kesanggupan masyarakat, itu berapa kalau dihitung dan diuangkan berapa terus dana bangunan itu bisa selesai kapan, memerlukan dana berapa hitung-hitungan kira-kira memerlukan dana” Kalau untuk dana alhamdulillah program PNPM bisa selesai dan mutunya juga bisa lebih bagus karena disitu banyak pengawas di program PNPM itu sebelum melaksanakan prasarana sudah dibentuk tim-tim. Ada tim 6, ada tim 18 yang terdiri dari tim 6, tim5, tim 4, tim 3 itu juga tugas masing-masing ada pengecekan, pembukuan, ada yang mendampingi pencairan, ada yang mencari suplaiyer barang, dan ada juga barang yang tidak sesuai spek bisa dipulangkan kembali dan tidak diterima. Pelaku PPK juga harus ikutin aturan karena disitu sudah di-spek-kan, sudah dianggarkan kalau semen, semen Holcim harus Holcim, kalau aspal harus Pertamina Cilacap, ya harus”.

”Jadi masyarakat di situ harus mengetahui barang ini bagus - dan barang ini jelek. Selain itu juga ada inspektor otomatis ngehitung kubikasi kalau pasir ngehitung jadi kita juga tau ngehitung kubikasi gini tau juga. Jadi pas pembayaran bisa kubikasi kadang-kadang suplaiyer bisa mencari keuntungan besar padahal kalau ga ada *cheker* otomatis ga diukur, dia ngaku sekian titik tapi di sini ada *cheker*. Jadi supliyer barang ga bisa membohongi ke masyarakat lagi”.

”Untuk dana semua desa untuk kerja naik itu ga bisa, di situ bantuan sudah di sosialisasikan upama ada bantuan sekian milyar contohnya seperti kemarin ada 2 milyar yang beberapa persen buat pinjaman kalau untuk semua terdani semua termasuk SPP

dapat tergantung dari usulan-usulan dia terus diverifikasi jadi usulan. Jadi yang mengusulkan 100 tapi jadinya 50 di SPP maksudnya 100 orang jadinya 50.

Pernah...pernah ada, ada yang mengusulkan 40 tapi setelah diverifikasi jadinya 30 itu pernah ada”.

”Ada soalnya bukan untuk usaha tapi terus terang untuk setoran motor, untuk bayar hutang, cuma gali tutup lubang untuk membayar hutang.

”Untuk faktor pendukung itu disesuaikan daerahnya masing-masing, daerah kebutuhan faktor pendukung daerah seperti di Karang Tengah faktor pendukungnya, material-materialnya, tenaga kerja, pasir terutama bahan-bahan sudah banyak. Hanya keterampilan saja belum pernah diajukan prasarana, ya keterampilan prasarana harus mengajukan anggaran jadi kalau ini belum ada prasarana. Ya usaha keterampilan belum ada pembinaan karena membutuhkan anggaran yang mengajukan yaitu aja prasarana tidak dapat. Jadi kalau untuk ini prasarana tidak ada berarti harus memilih, itu masuknya ke prasarana pembangunan jadi nanti di situ ada sewa gedung.. Nanti kalau ada kegiatan pelatihan keterampilan jadi mengurangi dana kegiatan.”

”Ya masih belum masih terbatas, itu sebenarnya masyarakat diundang, tokoh-tokoh, kadang masyarakat berpendapat sudah ada yang mewakilkan kadang kadang RT nya datang dianya malah ga datang. Biasanya harus datang RT, RW biasanya datang. Jadi masyarakat ngandelin”.

”Masyarakat RTM di daerah sini miskin jadi untuk makan sehari-harinya kerja sehari habis untuk dipakai makan, ya yang rata-rata yang kuli. Jadi kalau yang untuk rapat untuk cari cadangan makan ga ada. Jadi kalau ninggalin pekerjaan sangat susah.

”Ya untuk pendampingan memang betul karena pendamping dari desa kurang, itu pelaku juga. Jadi anggaran operasional itu juga, itu aja kegiatan jadi untuk pendampingan pelatihan peminjam itu tidak ada”.

”Ya contoh pilihan ada 2 speknya yang sebaiknya masyarakat pinjaman besar kalau masyarakat untuk mengembalikan lambat laun tapi alhamdulillah di desa Karang Tengah itu macetnya sampai kemarin itu sampai 60 juta tapi setelah kita dampingi ke masyarakat alhamdulillah sudah ada masukan 20 juta”.

”Tadi ada sanksi lokal yang disepakati dalam MAD kecamatan, jika disetujui kemudian pinjaman SPP bisa mengajukan sarana apabila pengembalian mencapai 90% jangan sampai nanti pinjamannya masyarakat berarti pelaku kena. Terus jika penangguhan ada PPK dari kabupaten juga membantu mengasih pengarahan agar pengembalian 90%. Jadi untuk bangunan tahun ini sudah tidak mengikuti perangkan lagi”.

”Sumber dana di masyarakat kan bisa dari uang setoran di UPK, si pelaku juga ada jadi si pelaku setiap tahun ada penawaran jadi dilacak dari tahun pertama kali pinjam dicocokkan dari kecamatan lalu dibawa ke masyarakat lagi ditanya dana pinjaman masih ada dari dana ini. Ada yang ngaku, ada yang bilang lunas, tapi biasa suka ada kesalahan dimana itu bisa dilacak berhenti apa dari pelaku apa dimana jadi diselesaikan”.

”Ternyata alhamdulillah pemasukan 20 juta jadi pengembalian bisa 90%, kebetulan ada 2 desa yang kena sanksi yaitu desa Karang Tengah sama desa Bojong Koneng itu desa paling pelosok kalau yang agak kota daerah Babakan.

Bahwa yang tadi saya utarakan uang yang dari pemerintah tidak dikembalikan tidak apa-apa, tapi setelah dikasih tau harus dikembalikan dinasehati dibilangin harus di

kembalikan. Tadinya sebelum pinjam juga ada perjanjian juga ada yang pura-pura kalau mogok apa yang kita selesaikan tapi belum pernah kita lakukan. Pinjamannya biasanya bergiliran 1 juta yang dikembalikan baru 500 ribu, baru separuhnya tapi setelah itu di kasih kemudahan mengembalikan bisa dicicil tiap minggu berapa uang, jadi ga di terapkan berapa bayarnya tiap bulan jadi ini dikasih kemudahan bayar.

”Sekarang lebih hati-hati karena sanksi lokal masih diterapkan agar pelaku-pelaku dikasih pengarahan. Kalau RTM ada yang minjam, ada juga yang ga berani, ada juga yang minjam dipakai usaha kalau dipakai minjam nanti dipakai makan bingung untuk mengembalikannya kalau dipakai usaha nanti keuntungannya berapa buat bayaran cicilan barapa pengembaliannya. Kalau RTM biasanya di sini dagang, karena di sini dekat sama perumahan. Ada yang dagang warungan, bakso, siomay terus ada yang jualan pakaian terus dari pertanian ada yang jualan pisang dari kampung dibawa ke pasar. Jadi 500 ribu alhamdulillah cukup untuk modal”.

”Jumlah RTM yang pinjam itu hampir banyak RTM bahkan untuk pengembalian lebih mudah yang RTM itu karena takut kalau kita nuntut. Kebanyakan orang miskin tapi kalau orang yang punya uang 100 ribu aja bilanganya ga ada uang tapi kalau orang yang kaya lebih ga diutamakan, biasanya ditanya dulu mau dipakai usaha apa, tapi diverifikasi dulu. Usaha pertama kali boleh, biasanya diverifikasi ditanya punya keterampilan apa, di bidang apa. Jadi di dalam kelompok, ketua kelompok harus mengetahui ini usahanya apa. Kemarin diverifikasi ada yang ngomong tapi bayar hutang sudah ga dapat, kalau dipakai bayar cicilan motor, buat bangun rumah, buat makan, kalau dipakai buat usaha pasti dibantu”.

Ibu Enung Patonah :

”Program yaitu ekonomi mau pun fisik kira-kira sesuai dengan kebutuhan dan kondisi, sesuai dengan masyarakat belum sempurna, belum sesuai benar. Misalnya ada masyarakat yang kurang mampu melayani dilihat dari kondisinya pengembaliannya sangat susah, harusnya dimana layanan PPK bagi mereka yang ga mampu yang mereka inginkan”.

”Di situ kan sudah ada dulu kita bikin bendungan, terus yang ke dua bikin jembatan gantung. Kalau masalah bangunan suda, tapi memberdayakan masyarakat belum, gimana caranya masyarakat mau karena SDM nya rendah. Mereka itu kerjaan apa, kerjaanya kuli pasir di kali, anak kecil pada kerja di situ ya minimal umur 10 tahun paling sudah ke kali. Saya juga tidak tahu modelnya apa. Kalau ada kegiatan itu cukup karena tidak ada dari luar, sama dianya disamakan. Kalau dari program PPK sendiri dari dana fisik, dana pendampingan”.

”Karena kita setiap desa ada 8, dikalikan 2 usulan sudah berapa sedangkan 1 tahun dapat tunggakan 1,5 berarti dapatnya 5 desa. Jadi pemerataan tergantung rangking desa, ininya ada berapa, itunya ada berapa, ya kurang.

Kalau SPP murah ga, kalau SPP murah bayar 15% dari dana. Kalau ga didata apa ada pembayaran, ada sesuai kebutuhan. Kan ada ini dapat bergiliran SPP. alhamdulillah sekarang cukup, ada yang bilang cukup, ada yang bilang ga tergantung masyarakat aja.

Kalau sasaran cukup untuk enam kelas, berarti satu kelas dibagi dua karena dananya terbatas, itu bisa lebih dari ya tergantung pengeluaran dananya, kita juga sesuai kemampuan.

Kalau dari tenaga pendamping untuk mendampingi masyarakat miskin.

Jadi cuma enam orang satu kecamatan, kita juga ga tau cukup apa tidak.

Kalau kelompok harus didampingi terus sama KPMD atau untuk ke desa masing-masing, jadi di desa TPK 2, KPMD 3 untuk sementara dialihkan tapi untuk macetnya itu susah orang-orang.

Yang ketuanya, tapi biasanya TPK angkat tangan, harus ketua kelompok karena banyak kegiatan yang di lakukan TPK ini.

Kalau pilihan ini sarana sekian persen itu kan pilihan masyarakat, itu usulan dari masyarakat tetap apa pun kita ada keterampilan menjahit apa mentoknya di desa.

Masyarakat maunya apa dulu misalnya tahun 2009 ada yng minta keterampilan kecantikan, di desa kan ada tiga dusun nanti yang dapat siapa usulan jalan apa jalan di perbagus.

Berarti kalau keterampilan udahan, fisik ga dapat. Ya sama aja itu termasuk fisik bisa ya, berarti fisik dapat, keterampilan juga dapat. Tidak bisa harus salah satu tapi kalau di desa harus dua.

Yang pertama itu dari SPP yaitu sarana dan prasarana, kalau yang ke dua keterampilan campuran karena dapat dukungan dari masyarakat karena kepentinganya banyak tapi karena kalah dukungan itu salah sendiri dukungannya.

Yang dikalahkan di dusun sendiri bukan di desa, di dusun aja sudah kalah, kan gini minimal di dusun yang kalah minimal kan kita cerita kepada orang-orang yang di atas kan jangan dari program PNPM aja yang diambil, bisa dari program apa saja jadi tidak mengandalkan PNPM saja.

Kalau bisa dari program lain gitu, jadi pingin kaya begitu karena dari kecamatan kita ke desa dulu baru ke kabupaten.

Tapi bebas atau dibatasi, kita bebas tapi untuk sarana dan prasarana belum harus jalan seperti keterampilan bengkel ada tapi salah kebutuhannya, jangan kebutuhan masyarakat pembangunan buat ke pasar lancar. Jadi prioritas itu kalau bisa dari desa yang lain mendidik masyarakat bengkel laki-laki.

Sudah lama program apa pun kalau jangan dilarang, ini aja beasiswa dari sekolah ada.

Dari sudut itu tercapai ya tercapai, kalau kaya gitu apa yang harus yang di sejahterakan, kalau fisik sudah kuat masyarakat bisa makan setelah itu pekerjaan serabutan lagi jangka pendek.

Kalau dari menambah modal orang yang disekitar kita secara umum apa keuntungannya itu warungnya dibikin lebih banyak tapi kecil-kecilan untuk prasarana juga ada jadi sasaran utamanya kalau dipikir bikin apa, sudah tidak ada.

Pertambahan juga tidak ada ijin dari bupati karena tidak boleh membangun jembatan, bukan jembatan karena kemarin banjir bandang dari situ.

Kemudian faktor pendukung di sini ada beberapa keberhasilan PPK, yang pertama :

1. Sesuai kebutuhan masyarakat
2. Sesuai kebutuhan masukan dan tujuan program
3. Kemudahan beberapa pruduk dan tujuan program kemudian materi pendidikan misalnya PPK di latih keterampilan sesuai pendidikan.

Kalau untuk latihan besok ada latihan PPK lagi neh mau ada pembangunan, jadi yang dapat Cuma 5 desa.

Satu desa memang berapa...???

Kalau pak irawan hampir 300 ribu, kalau saya SMA dengan tiga kelas,kamar mandi, WC.

Yang di latih berapa orang...???

Ya 5 desa itu.

Terus selain PPK perhatian dari siapa lagi...???

Dari KPMD setiap tahun.

Yang tahun lalu diulang lagi, kan belum tentu setiap tahun orangnya itu-itu juga kan ada pergantian.

Jadi masyarakat yang pilih ini-ini KPMD pun ga bagus ya beli lagi, jadi gimana masyarakat.

Ya kadang-kadang ada yang baru, kalau PPK baru kemungkinan kebanyakan banyak yang baru tapi saya kan baru latihan jadi orangnya sama.

Masyarakat banyak tidak tahu kebanyakan sudah kita omongin makanya saya bilangin ke masyarakat jangan ngerumpi aja.Tapi bukan, yang diundang ketua RT, ketua dusun, bukan tokoh-tokoh aja yang di undang, masyarakat umum kan ada informasi juga kalau ada nanti di tempel-tempelin.

Kalau di Babakan berarti di desa kalau di sana juga, ya masing-masing berapa kali, MAD, sosialisasi di tingkat itu penjelasan ada, sama aja ada MD1,MD2,MD3.

Tadi saya tahunya penambahan jalan,ada yang bilang gitu.

Dalam PPK, kalau yang dulu masyarakat.

Terhadap RTM juga, kalau RTM belum jelas kalau ditanya agak-agak gimana sedangkan verifikasi RTM semua, kalau didata RTM ga mau kalau BLT mau.

Kalau kelompok ini kan dulu banyak bank keliling, sekarang kan bank keliling sudah berkurang, ini mencari nasabah sudah agak-agak susah karena kita sudah masuk ke PNPM karena setiap bulan kalau rentenir kan setiap hari.

Ya sulitnya kaya gini karena masyarakat inginnya kerjaan tetap, punya penghasilan tambahan kalau RTM kan belum mencarikan lapangan kerja, baru simpan pinjam"

Bpk Ujang

"Bagi saya sendiri dan teman-teman yang sudah, alhamdulillah ini cocok karena semuanya dipakai usaha tukang siomay, yang jualan gorengan alhamdulillah semua sudah ada, semua cocok.

Saya kurang tahu karena semuanya tidak sama.

Oh...mungkin ini jalan, jalan diaspal kalau yang ini belum. Dulu sudah kan, dulu waktu yang dulu kalau ini dari PPK yang dulu ga tau dari siapa.

Kemarin waktu datang dipakai buat jembatan mau dibangun kata mas Parno, sampai sekarang belum selesai.

Saya ga tahu masalah pendampingan itu.

Ga tahu saya pak...ga tahu.

Kalau taunya pak ujang PPK apa selama ini...???

Cuma ini saja saya dimodalkan, kalau yang lain saya ga tahu tapi alhamdulillah semenjak dikasih modal semua lancar.

Ga ada begini-begini, ga ada yang nunggak semuanya lancar.

Kalau ini memang swadaya masyarakat banyak, ada juga bantuan dari PPK.

Makanya saya kurang tahu dari PPK berapa, yang tahu saya masyarakat ikut kerja swadaya kadang-kadang diplus sampai malam kerja sampai jam 12, siang kerja pakai batu nanti malam kerja lagi, semua masyarakat ikut kerja.

Kalau jalan itu memang ajuan desa, jalan jelek ini desa apa ada jalan kesini, kalau masalah biaya saya ga tahu.

Ya ga ada jalan dulu.

Ya belum diaspal tapi dikasih batu-batuan sama masyarakat, terus bantuan dari pemerintah aspal ini sudah dua kali tapi saya kurang tahu dari mana asalnya.

Mestinya kegiatan-kegiatan bagi warga miskin biasanya sasaran sesuai kebutuhan masyarakat atau cara sendiri dari pemerintah, itu ajuan dari masyarakat misalnya saya mau usaha, itu ajuan dari masyarakat tapi alhamdulillah di tanggapi.

Ya makanya itu saya kurang tahu pendamping,

Ya kalau saya hanya mas Parno saja sama Bapak, selain itu ga ada.

Kalau mas Parno begini misalnya mau habis sebulan, kalau sebulan 120 ribu misalnya ada yang mentok 30 ribu atau ada gangguan ya kita bilang aja ke mas Parno, enak nya kaya gitu.

Kalau kurang misalnya ada 5 orang 150 ribu itu tombok sama mas Parno, saya terus terang saja dari pada ini gitu mendingan kaya gini jadi tinggal bayar sama mas Parno, setiap tanggal 15.

Ga saya yang antarin, bukan mas parno kesini jadi biar pada ngerti semua.

Ya makanya itu kalau misalkan tanggal 14 mas Parno mau setor ini dari anggota ada yang belum lunas, ya di tombok sama mas parno yang penting mas parno bisa setor, nanti tanggal 17-18 baru kita yang bayar ke mas parno.

Ya alhamdulillah perjuangan mas Parno itu lancar, misalkan mogok anggota bikin keuanganya di tombok dulu sama dia.

Cuma delapan orang anggota, belum ada lagi makanya itu tadi ngomong ada juga yang mau pinjam ke saya tapi saya ga berani, silahkan saja ke mas Parno soalnya yang mengelola kan mas Parno.

Jadi kalau ada yang nambah bisa di gabung, ya bisa jadi dua belas gitu.

Sekarang gini ada delapan orang nanti tambah delapan orang jadinya kan enam belas.

Mas Parno itu belum ada jawabannya itu takutnya ga benar nanti saya yang keberatan, jadi sudah jelas ngomongnya kaya gitu.

Terus sama ibu sudah melaporkan kalau ini itu mau pinjam kata mas Parno takut ga lancar nanti saya yang keberatan.

Kalau hasil bantuan dari PPK meningkat, ya alhamdulillah kalau bagi saya, saya kan ga tahu yang lainnya kaya gimana.

Kalau saya alhamdulillah karena bisa bongkar atap rumah, itu hasilnya ada di sini terus sekarang juga sama ya ada hasilnya.

Saya ga tahu perbaikan jalan, yang saya tahu masalah pinjaman-pinjaman saja semua lancar mencukupi keluarganya hasil dari itu.

Saya baru dua kali karena sekarang rencananya sekarang 2 juta kalau selesai ini, kemarin ada yang ngomong sama mas Parno bagaimana rencana saya, sekarang kan mau dikasih 2 juta gimana, kalau dianya ga mau ya mau ambil yang se-juta aja dianya.

Terus gimana sama anggota yang baru, katanya saya takut ini pak ujang nanti saya nombok lagi.

Se-juta.

Yang 500 ribu sudah beres terus ambil yang satu juta ini nunggu beres.

Ga cuma 10 bulan, ini belum 10 bulan saya tinggal 55 ribu lagi sudah mau lunas ya.

Mas Parno kemarin kan tinggal 1 bulan lagi gimana kalau langsung di tutup sama 8 orang bisa ga langsung dapat lagi sekarang tinggal bulan depan mau di tutup 150 ribu lagi tapi dapat lagi sekarang.

Jangan ya kasihan yang ga sanggup tapi gimana bisa mengajukan yang lima orang, misalkan yang lima orang sanggup tutup saya mengajukan bersama-sama.

Jadi nanti dana dari bapak bisa di pinjam lagi, yang sudah di kembalikan lagi.

Mesti harus begitu diputar sama yang lain tapi nyatanya ini belum, belum ada tambahan kata mas Parno kalau ga lunas nanti saya yang ribet.

Sekarang gini aja dilihat aja orangnya yang jujur benar-benar dibuat usaha.

Berarti yang mengajukan banyak, kalau yang mengajukan itu banyak, namanya juga orang kalau ada kebutuhan ngomongnya gini, takutnya gitu tapi kenyataannya ambil bank keliling aja yang setiap hari mau ambilnya enak kalau ada yang kosong-kosong makanya mas Parno takutnya kaya gitu.

Kalau saya terus terang saja sama mas Parno jualan ini kue mas, saya 4 ribu sehari jadi saya naro kue 20 biji delapan ribu kan berarti saya masih narik 4 ribu, masuk jadi setiap hari aja saya sama mas Parno.

Alhamdulillah hasil dari itu saya bisa bangun rumah, bikin dapur, alhamdulillah.

Kalau saya sehari modalnya 300 ribu.

Itu termasuk minyak...???

Semua sudah dihitung bahan pokoknya, modal 300 ribu nanti baliknya 360 ribu jadi untung 60 ribu kalau meleset bisa 40 ribu karena bikin kue suka ada gagalnya

Ya belum sampai paling satunya 100 rupiah.

Dari sini 400 rupiah di sana ngambil 100 rupiah.

Satu liter dua belas ribu modalnya, gula, minyak, bahan bakar, tepung jadinya empat belas ribu per liter ada jadi dua ribu per liter jadi empat puluh ribu.

Ini kalau mekarnya bagus ada peningkatan sepuluh ribu, kalau 5 macam jenis bisa enam puluh ribu.

Agak kecilan sedikit 1 liternya jadinya 50, sampai ini jadinya cuma 35 per liter, kalau misalkan 60 ribu ada yang balik lagi sisa 5 atau 6 biji maka nya saya rata-rata 40 ribu.

Misalkan ga laku 10 biji kan kasihan, kadang-kadang ada yang lecet, ya saya ambil lagi.

Saya ganti, ya sama-sama setengah komisi tapi begitu datang masuk langsung bayar tapi kalau ga habis nanti saya ganti.

Kalau setor sehari 4 ribu, kan saya ambil se-juta jadi se-juta 200 ribu jadi kalau 1 bulan 120 ribu di bagi 30 aja kan 4 ribu 1 hari.

Ga ada libur, terus kalau saya, kalau yang lainnya gimana habisnya saja, ada juga yang mingguan, ada juga yang bulanan.

Kalau saya terus terang tiap hari nanti kalau setiap bulan terlalu gede, kalau kaya gitu kan enteng.

Sekarang juga ada pesanan 200 biji buat hajatan nanti malam saya bikin biar besok pas undangan masih hangat.

Kalau 5 liter beras jadinya itu 250 buah yang 5 jenis, kalau 400 berarti 200 ribu modalnya sampai 140 ribu kalau 5 jenis kaya macam kue ali agak kecil sedikit, kalau jualan sama 400 kalau geplak, yang lain 300 kalau kue ali jadinya 40 1 liter kalau cucur Cuma 35.

Kalau teman-teman yang lain lancar siomay dan ketoprak".

FGD di Pamijahan

"Ya alhamdulillah program PPK di kecamatan Pamijahan sudah ada sesuai konteks misalnya pengajuan fisik dan non fisik, kalau di desa ekonominya sendiri yaitu fisik sudah dapat jalan, pengaspalan jalan dan irigrasi sudah 2 di RW 3 dan di RW 1 terus ekonominya alhamdulillah sampai sekarang sudah ada 18 kelompok, satu desa 18 kelompok.

Satu kelompok berapa orang...???

Ada yang 10, ada yang 6 orang.

Kemudian untuk keluarga miskin apa ada pendampingan...???

Belum ada, seperti tadi khusus belum ada, kita sudah mengajukan tapi prioritaskan yang lain.

Kalau yang menentukan prioritas siapa...???

Masyarakat sendiri.

Tapi yang mengusulkan dan prioritaskan kalah banyak, ya jadinya kalah.

Tapi dari kelompok ibu-ibu atau perempuan jadi lebih banyak campurannya. Jadi waktu penagihan yang datang kurang, kalah suara...???

Ya kalah suara karena di desa kita kebanyakan para petani, jadi yang lebih diutamakan mungkin irigras karena ada peningkatan dan pencairan.

Sementara sama, barang kali yang disampaikan ibu-ibu sesuai kondisi di kecamatan pamijahan ini untuk mengena sasaran baik itu dari awal pertama proses usulan, yang di usulkan melalui kecamatan yang nantinya disesuaikan di tingkat kecamatan.

Seperti apa yang bapak tulis ini, sesuai dengan teknis PNPM atau PPK itu memang sudah sesuai.

Untuk yang ke duanya memang untuk kecamatan Pamijahan sendiri belum mencapai, khususnya pelatihan-pelatihan masyarakat.

Sesuai bapak sampaikan belum ada prioritas khusus dari orang miskin yang akan mengembangkan keterampilan, jadi itu kendalanya sudah disampaikan mungkin di proritaskan karena kondisi wilayah khususnya pegunungan, pesawahan jadi sesuai dengan yang PNPM, memang itu masih terkena pada sasaran RTM.

Saya menanggapi yang swadaya berupa penggalian swadaya, kalau yang B masalahnya dana pendidikan, dan untuk pelatihan termasuk dana.

Mungkin berapa dari dananya yang pernah kita rasakan kalau pendidikan siswa yang dari dana sosial dari PNP, dari anggota SPP itu ada dana sosial.

Itu nanti dikeluarkan berapa tahun sekali dan di bagikan lagi ke masyarakat sekitar kecamatan hanya beberapa, ya ga semua...!!!

Ya ga semua, terus penggalian swadaya itu di haruskan supaya bertanggung jawab karena itu rasa capenya dan itu juga dari tahapan misalkan dari Musdus terus sosialisai proogram PNPM ini dari musyawarah dusun dulu, terus musyawarah desa baru nanti prioritas mana yang diusulkan ke kacamatan nanti di situ musyawarah desa prioritas sosialisasi, misalkan kita dapat fisiknya kaya kemarin irigrasi.

Nah swadaya itu berapa, berupa tenaga pasir mungkin itu materialnya yang dekat dengan lokasi selain tenaga kerja mungkin apa ya, dana misalkan orang kaya ga bisa kerja bakti, ya mungkin kopi-kopi gitu, makanan-makanan, konsumsi gitu.

Tetap sosialisasi kita terus sampaikan ke masyarakat biar masyarakat tahu, uangnya itu turun berapa nanti. Setiap fisik sudah berjalan kan tiap 40%, ada lagi musyawarah tapi 80% musyawarah lagi, ada sama masyarakat selalu terbuka.

Jadi tahu masyarakat yang lain, jadi tahu karena yang terlibat kerja juga masyarakat kepercayaan sesama pelaku, jadi sering kontrol dan nanti setelah fisik itu selesai ada lagi tim pengelola yang di bentuk dari masyarakat itu sendiri.

Mungkin mengenai RTM tadi, kalau sisa dari poin B bahwasnya kalau program PNPM ada pendapatan dari sistem swadaya sebelum pendanaan dari PNPM itu masyarakat berbondong-bondong melakukan swadaya untuk membuktikan mereka layak didanai melalui swadaya yang mereka lakukan.

Maka untuk usulan pinjaman RTM memang disampaikan ibu-ibu tadi ada katanya tim sendiri maupun yang ada desa khususnya yang tahu persis bahwa keadaan itu RTM apa tidak.

Memang kita pengelola ga mau mereka dimiskinkan artinya ketika sudah miskin tidak punya usaha ketika kita memberikan pinjaman.

Kalau konteksnya mereka produktif, kalau miskin produktif setuju, kalau miskin dia mengandalkan untuk melakukan suatu produktifitas yang berarti.

Saya kira memiskinkan masyarakat miskin yang ada pinjaman, dia akan terbebani.

Nanti bulan depan saya harus membayar cicilan terkecuali beri sasaran RTM yang tidak produktif atau sasaran PNPM atau PPK sendiri rumah tangga yang produktif mau berusaha untuk berjulan atau apa pun.

Kalau untuk pendampingn RTM masyarakat tadi RTM yang tidak produktif memang belum ada.

Misalkan RTM A dianya ga punya penghasilan atau penghasilanya sedikit, misalkan suaminya 150 dikasih pinjaman modal dari PPK tapi dia dibimbing misalnya dia punya keterampilan apa, bisa bikin kue atau menjahit lebih bagus lagi pendampingnya.

Selain simpanan pinjaman modalnya dibimbing juga gimana caranya misalkan mengembangkan keahlianya itu supaya bisa menghasilkan uang.

Kalau SPP sendiri apa ada bimbingan usaha...???

Belum ada.

Jadi peranan pendamping itu apa...???

Kalau yang sudah berjulan itu bimbingan sudah maksimum misalkan dari PPK itu yang jualan warung, jualan di pasar, nah itu yang dikasih modal.

Selain di kasih modal apa bimbingan yang lain...???

Mungkin sampai ke situ belum ada.

Ini memang yang ditulis bapak poin C didalam lingkup kecamatan Pamijahan sebenarnya bukan tidak ada binaan di dalam kelompok, yang istilah binaan hanya sebatas pembelajaran dalam poin-poin katakanlah adminitrasi ada pun yang disampaikan mengenai keterampilan memang belum tahap seperti itu dan seperti itu kita terkendala pendampingan maupun dari tingkat kecamatan khususnya yang dilakukan kecamatan

mempunyai kendala dengan beberapa kelompok satu wilayah memang cukup luas, itu yang menjadi hambatan bagi kita mengapa masalahnya.

Apa lagi satu kecamatan 150 kelompok yang harus kita bina, Nah itu yang jadi kendala bagi kita.

Sekarang selanjutnya sebenarnya melakukan metode usulan keterampilan itu yang di sampaikan tadi seharusnya ketika usulan di desa di munculkan di musyawarah khusus perempuan ,nah beda lagi dengan,kadang-kadang ketika desa sedang musyawarah di dalam khusus perempuan di usulkan mengenai kapasitas atau keterampilan para ibu-ibu atau pun yang lainnya terganjal melalui situasi perangkaan itu lah yang menjadi ganjalan pada saat keterampilan muncul dan pada saat perangkaan.

Di desa menang di kecamatan belum tentu menang.

Kalau untuk fisik mungkin ini sekali, ya apa namanya, sangat meningkat.

Tadi kan contoh di RW1 sampai RW5 yang dibangun dua tahun lalu, tadinya kan jalan setapak sekarang sudah bisa dilalui kendaraan namun transportasinya lebih cepat, kan di RW6 itu kan beda desa ada pasar dari sini sendiri ada yang petani, pedagang banyak yang masar di pasar satu, nah itu otomatis akan mempercepat, misalkan muter dulu ini lewat situ kan lebih cepat waktu dan hasil pertanian yang di pasrkan di sana tidak sampai layu dulu, jadi adalah keuntunganya banyak sekali.

Kalau pinjaman modal sekarang tanya aja, alhamdulillah saya juga termasuk anggota SPP, alhamdulillah itu sangat membantu sekali misalkan tadinya saya modalnya sedikit tambah lagi masuknya sekarang lebih meningkat tambah banyak.

Misalkan sebelum dapat pinjaman pasarannya itu-itu aja karena ditambah modal lagi, saya juga mencari langganan lagi karena modal tambahan otomatis sistemnya keluar masuk.

Kalau mencari barang kalau langganan harus cari modal lagi, makanya kalau sudah dapat pinjaman SPP sendiri baru saya berani cari pelanggan lagi biar ada modal.

Kalau dari pendapatan alhamdulillah bertambah ya kan langgananya jadi bertambah lagi.

Ya membantu yang jualan sedikit jadi banyak, suami saya kan jual gantungan, ya yang dulu jual 1 kerdus sekarang bisa sekeranjang jadi sangat membantu sekali.

Pendapatan keluarga naik, anak-anak bisa sekolah.

Dulunya 2 keranjang, sekarang 6 keranjang

Bisa ambil motor, setor motor sebulan sekali pak.

Baru tiga kali pengambilan pak.

Alhamdulillah nambah modalnya, nambah pelanggannya untuk penghasilan sedikit demi sedikit.

Ya ada perbedaan.. Mendukung.

Yang poin B ya, saya sependapat dengan yang ditulis oleh bapak sasaran program memang belum sepenuhnya tercapai secara fisik untuk meningkatkan kesejahteraan.

Jadi kalau dilihat infrastruktur saja sebenarnya masyarakat tidak secara hanya saja ketika terkendala distribusi barang itu dengan adanya membangun jalan yang dibangun PNPM habis mempermudah akses untuk pembawaan barang tersebut dari produsen itu sendiri termasuk yang tenaga kerja menyediakan lapangan kerja jangka panjang, kalau jangka pendek jelek adanya pengerapan tenaga kerja masyarakat itu akan terakomadir dalam pembangunan-pembangunan dari sisi SPP menjadi dari sisi panjang pun ekonominya itu

sudah di sampaikan ibu-ibunya ke pelanjutannya lapangan kerja jangka panjang atau yang berkelanjutan, contoh seperti pabrik-pabrik lah atau peningkatan belum ada. Tidak adanya satu usulan dari keterampilan termasuk dan juga bagi kalau dari lembaga yang di lestarikan program kalau dari visi prasarana sendiri sudah ada.

Jadi tim pemeliharaan ada cuma ga efektif cara kerjanya semata-mata hanya dibentuk berdasarkan program ketika ada masalah atau jalan-jalan yang rusak jadi bukan ttttim pemeliharaan, semua masyarakat yang ada di situ harus mau membereskan permasalahannya itu dengan jalan.

Secara itu bukan dengan pembangunan ada yang rusak jadi seperti itu, masih kurang efektif.

Sesuai dari kebutuhan masyarakat sepakat dengan program dari PPK terus materi pendidikan juga sesuai dengan tugas-tugas atau prinsip-prinsip PPK atau KPMD.

Tidak ada, belum ada bimbingan usaha.

Belum ada kalau itu, berupa administrasi.

Ya setiap tahun pelatihan bagi pelaku PNPM.

Faktor pendukung dari 3 tersebut memang sesuai apa yang peroleh dari bapak dan hanya saja barang kali faktor pendukung yaitu mengenai yang disebutkan kesepahaman antar masyarakat itu sendiri.

Itu merupakan termasuk biaya atau kekompakan itu juga salah satu faktor pendukung ketika untuk usulan itu muncul dari tingkat desa atau pun di tingkat kecamatan termasuk waktu pembangunan ga diganggu, pada saat pembangunan jadi ketika masyarakat satu tujuan artinya untuk membangun satu wilayah itu hal-hal apa pun itu tak akan terjadi di dalam masyarakat itu sendiri bekerja dengan kompak mungkin seperti itu PNPM."

"Kalau bikin sosialisasi program pernah ada waktu ditanyakan apa arti PNPM, PPK ga mengerti, mungkin pertanyaan yang ga pernah hadir ke desa atau dia ga tahu diundang ke desa, ga tahu ada apa mungkin SDM nya.

Misalkan yang suka ikut ke desa, kita undang yang tahunya hanya PPK yang sekarang lebih PNPM.

Kalau para pelaku dalam desa mungkin tahu ya, bukan maksud saya itu pada pelaku atau termasuk keseluruhan itu termasuk yang miskin yaitu tidak hadir di desa, di undang tidak mau hadir mungkin dia kehilangan penghasilan harus hadir ke desa.

Sosialisasi ke pelaku desa selama ini, sosialisasi yang dilakukan ke desa sampai ke dusun-dusun atau ke RT-RT atau ke RW-RW sampai ke ibu-ibu.

Ya sampai.

Kalau yang pinjam pasti tahu.

Saya sepakat dengan faktor penghambat bahwa evaluasi itu hanya terbatas, evaluasi yang dilakukan oleh tim, baik itu tim kordinasi di tingkat kabupaten atau pun tingkat kecamatan sekali pun desa hanya berupa sarana prasarana itu pemberdayaan itu sendiri bukan di daerah cuma ga terlalu efektif hanya saja evaluasi dilakukan pada saat ketika pelaksanaan pembagunan itu berjalan baru ada istilah evaluasi.

Nah sebelum-belumnya bukan tidak ada tapi ada prekuensi tidak selalu sering dan memang tidak terlalu efektif hanya saja muatannya tingkat kecamatan saja evaluasi khusus di bidang pemberdayaan

Ya biasanya mengenai perencanaan yang dilakukan apa sudah sesuai dengan petunjuk teknis atau TNPN dari sisi usulan ditentukan itu tingkat desa menentukan satu usulan dari

yang bersumber dari campuran atau musyawarah laki-laki yang selanjutnya itu adalah di prioritaskan khusus bagi perempuan ada keistimewaan untuk perempuan bukan usulan.

Itu kadang-kadang masih terhambat di faktor evaluasi perencanaan, yang selanjutnya adalah adanya jaminan keberlanjutan memang dilihat dari sisi keberlanjutan untuk jangka panjang mengenai hal katakanlah untuk penyediaan lapangan kerja memang belum ada dikarenakan terbentur dari proses atau program yang mengadakan istilah satu untuk usaha keluar dari pengelola perusahaan produktif dan memang usulan-usulan untuk penyediaan untuk desa sendiri contohnya untuk limbah sampah memang belum ada jadi masih terkendala pada aturan atau memang penyampaian hal seperti itu jadi seperti itu.

Nah kalau dari TP 3 itu ada yang berjalan tapi biasanya itu masuk ke perdes. Ini perdes kan seperti contoh salah satu prasarana mengharuskan adanya perdes, contoh itu bangunan berupa air bersih dan itu harus dimunculkan namanya perdes jadi ada saja yang TP 3 berjalan ketika itu dari sisi pembangunan itu langsung ke masyarakat memang berjalan tapi bisa ke dalam langsung peraturan desa.

Jelas kalau yang sekolah, pengelola sekolah itu bukan dari yayasan tapi dari komite sekolah yang jelas tim pemilihannya bersumber dari pihak yayasan sendiri termasuk komite untuk masalah pendidikan ini efektiflah.

Kalau irigasi belum ada yang rusak masih bagus.

Dibersihkan bareng-bareng, ada kelompok mitra cai yang menggunakan air.

Kekurangan, minimnya dana.

Ga boleh kalau 10 juta.

Paling banyak 2 juta.

Ga boleh nanti yang lain ga kebagian.

Kalau program belum membolehkan ke arah situ jadi penambahan modal hanya sebatas penambahan untuk produksi jadi bisa menambah pembangunan toko.

Itu belum bisa karena kendala.

Sementara tahun ini belum ada yang pinjam 5 juta, sampai 2 juta aja.

Agar dibikin lapangan kerja untuk ibu-ibu.

Bikin pabrik jadi ibu-ibu bisa kerja sambil jualan.

Memang arah pada peningkatan keterampilan setelah ditingkatkan harus ada penyediannya berupa alat-alat yang mendukung dalam sebuah keterampilan menjahit ketika beres keterampilan itu ada tempatnya jadi berkelanjutan itu akan ada, memang sementara ini belum mengusulkan belum terdani masalah keterampilan belum ada.

Ya memberi pemahaman kembali pada masyarakat bahwa peningkatan-peningkatan semua bidang hanya saja dari kemampuan fasilitator dari penyampain hal-hal seperti itu".

FGD SPP Dahlia

"Belum...tidak sesuai..."

Mungkin karena yang belum sesuai belum pernah meminjam, belum tahu sejauh mana tentang PPK atau RTM tersebut

Mungkin mau minjam tapi belum bisa, tapi selama ini yang sudah daftar ke saya tidak ada yang saya tidak kasih itu.

Ada juga yang sudah mendaftar tapi untuk kemudian dia tidak mau menunggu, dia itu kepinginnya bisa cepat langsung cair.

Kalau bank keliling kan cepat, terus terang saya bilang silahkan saja ke bank keliling kalau mau cepat kalau di PNPM prosesnya lama, harus mengadakan MD, MAD beliau

karena tidak ngerti mau oinjamnya cepat cash ga bisa kan kalau di program ini kan prosesnya lama untuk mendapat kecairan tersebut.

Kemudian kalau ini masukan dari PPK sendiri misalnya dana atau pendampingan bimbingan itu kan sebab akibat menyatakan sudah cukup misalkan dana buktinya belum cukup sehingga antar desa harus kompotisi, bagaimana itu...???

Jadi maunya masyarakat disama ratakan tapi sesuai program di sini tidak bisa di sama ratakan karena sudah di persetujuan makanya di kompotisikan.

Jadi misalnya 9 desa, inginya kan dapat semua tapi ga dapat semua kan...???

Ya tidak karena dana tidak mencukupi kemudian kegiatan yang di lakukan itu banyak untuk prasarana fisik atau pembangunan jalan, kemudian untuk SPP orang miskin RTM khusus ada apa ga...???

Ya ga ada kalau khusus dari RTM tidak ada selama saya berkecipung di program ini, kalau dikhususkan untuk RTM maka dari SPP memang seharusnya kita kasih yang benar-benar tapi seperti ini mereka tetap butuh karena dia untuk menambah modal tapi kalau selama ini ini berkecipung setahu saya tidak ada untuk RTM benar-benar dia miskin tidak ada. Kalau RTM itu ada beberapa persen rumah tangga miskin tapi pada ga ada pinjam di SPP karena pada takut, tidak sanggup untuk membayar.

Kalau dari PPK untuk melayani RTM seperti apa...???

Seperti ibu-ibu dikasih simpan pinjam kalau masyarakat umum diperlebar jalannya.

Kalau RTM apa...???

Kalau dari PPK itu belum khusus untuk RTM, kalau seingat saya belum kalau untuk masukan saya ke program harusnya ada khusus untuk RTM bagaimana caranya bisa membantu, membagi.

Mau saya seperti itu kalau untuk RTM .

Kalau yang sudah seperti contoh yang pinjam berkembang.

Ya kami ini kan pemeliharaan perawatan jalan selama yang saya tahu ini di program jadi tidak berfungsi.

Padahal di situ ada untuk pemeliharaan, perawatan, sudah di bentuk timnya, ketua.

Tapi selama ini saya lihat tidak berfungsi sama sekali timnya, padahal sudah dilatih.

Ya tim pemelihara saja, sudah dibentuk dan dilatih tapi selama ini sudah tidak berfungsi, tidak berjalan.

Belum paham beberapa pelaku seperti kades, pak RT, atau pelaku tokoh masyarakat.

Padahal seperti itu kami undang kalau untuk seleksi sangat susah karena ada aturan belum mencapai 100% untuk sosialisasi dengan RTM tersebut,

Jadi agak susah karena waktu, mereka itu butuh waktu untuk khusus gitu kan, sedangkan jika kita panggil rapat, sedangkan dianya punya rumah tangga untuk bisa makan, jadi mereka itu tidak peduli lah jadi malas untuk, datang rapat.

Kalau RTM ninggalin kerjaan kenapa...???

Ya rugi lah, kecuali kita bayar, sepertinya susah.

Jadi kalau masyarakat ninggalin waktu berarti ninggalin pekerjaan ya...???

Ya betul.

Apa sosialisasi ga bisa sore, apa selalu siang...???

Ya selalu pagi jam 8 atau jam 9 sampai siang, kalau malam juga dipanggil pada ga datang.

Kalau ini pendampingan khusus yang ditujukan kepada orang miskin orang miskin, bagaimana???

Belum...belum ada...

Kalau pendampingan untuk SPP sendiri bagaimana, seperti bimbingan, cara berusaha???

Ya ada tapi ga setiap saat ada bimbingan seperti sosialisasi PPK dari setiap tahun mereka yang memberi arahan.

Kalau materinya apa yang diberikan kepada kelompok SPP...???

Misalkan apa tanggung renteng, hidup di kelompok jika ada yang mogok yang lain harus tanggung renteng melunasinya.

Tapi ada juga kelompok yang macet, jadi rentengnya tidak dapat berfungsi juga ada jadi susah. Pada ga mau, ngapain bayarin orang.

Yang nanggung ya kelompok tersebut.

Misalkan ada yang macet, udah jangan diajakin lagi ke depannya.

Kena sanksi lokal ya...???

Ya jadi ga dikasih pinjam lagi sudah diputuskan kalau ada yang macet gitu.

Kalau bimbingan usaha biar lancar, bagaimana???

Ya ga ada.

Atau pelatihan khusus untuk keterampilan...???

Belum ada kalau pelatihan.

Terus kalau pendampingan khusus kalau setiap saatnya ga ada, jadi misalkan ke kelompok-kelompok...???

Ga sih, belum ada, soalnya model FK, pencairan saja datangnya, dan kalau nagih dari FK dan UPK yang datang.

Seharusnya memang ada, tapi KPMD kan honorinya sedikit, kalau TPK kan ga ada sama sekali, cuma dari selisih ada 0,3 kalau ada pelunasan SPP.

Ya kalau dari pembanguanan kan ada OP untuk KPMD kalau ada pekrjaan fisik, kalau ga ada ya ga dapat honor.

KPMD ada honorinya setiap bulan cuma dia kan ga benar-benar mendampingi di SPP tersebut tapi kalau di fisik benar-benar mendukung.

Kalau untuk SPP berapa % jasanya?

Pingin seh ga ada bunganya, pingin pinjam 1 juta di kembalikan 1 juta lagi.

Saya selaku TPK ingin ada honorinya, ya maksudnya begitu.

Kalau ga ada bunga, honorinya untuk yang kerja ga ada.

Dulu yang mengusulkan untuk jasa siapa...???

Ya itu keputusan dari atas, dari sana makanya waktu forum dari KPMD terus FM juga bicara seperti itu.

